

Pengadilan Agama Tulungagung

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025

Jl. Ir. Soekarno Hatta No 117 Tulungagung - 66261

KATA PENGANTAR

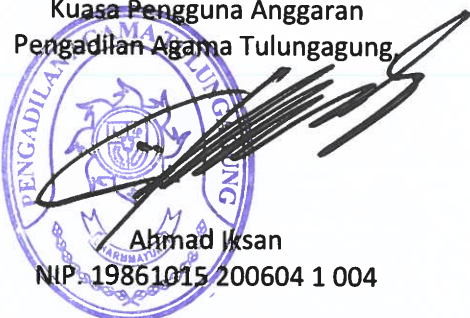
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Agama Tulungagung adalah salah satu Entitas Akuntansi dibawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Tulungagung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tulungagung, 23 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Tulungagung



Ahmad Iksan
NIP. 19861015 200604 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	5
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	8
RINGKASAN	9
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	11
NERACA	9
LAPORAN OPERASIONAL	10
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1. Dasar Hukum	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Tulungagung	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	3
A.4. Basis Akuntansi	4
A.5. Dasar Pengukuran	5
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	12
B.1 Pendapatan	12
B.2 Belanja	13
B.3 Belanja Pegawai	14
B.4 Belanja Barang	15
B.5 Belanja Modal	15
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	19
C.1. Aset Lancar	19
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	19
C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas	19
C.2. Aset Tetap	20

C.1.3. Persediaan	20
C.3. Aset Lainnya	21
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	21
C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga	21
C.4.2. Uang Muka dari KPPN	21
C.5 Ekuitas	22
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	21
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	21
D.2 Beban Pegawai	21
D.3 Beban Persediaan	21
D.4 Beban Barang dan Jasa	22
D.5 Beban Pemeliharaan	22
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	23
D.8 Kegiatan Non Operasional	23
D.9 Pos Luar Biasa	23
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	25
E.1 Ekuitas Awal	25
E.2 Surplus/Defisit LO	25
E.3 Transaksi Antar Entitas	25
E.4 Kenaikan/Penurunan Ekuitas	25
E.5 Ekuitas Akhir	25
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	27
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	27
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	27
F.3. Pengungkapan Lain-Lain	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	12
Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNPB Per 30 Juni 2025 dan 2024	13
Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2025	13
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2025 dan 2024	14
Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai Per 30 Juni 2025 dan 2024	15
Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang Per 30 Juni 2025 dan 2024	15
Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal Per 30 Juni 2025 dan 2024	16
Tabel 8. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024	19
Tabel 9. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 2024	19
Tabel 10. Rincian Persediaan	20
Tabel 11. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	21
Tabel 12. Perbandingan Rincian Pendapatan Per 30 Juni 2025 dan 2024	21
Tabel 13. Perbandingan Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni 2025 dan 2024	22
Tabel 14. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2025 dan 2024	22
Tabel 15. Rincian Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2025 dan 2024	22
Tabel 16. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2025 dan 2024	23
Tabel 17. Rincian Transaksi Antar Entitas	25
Tabel 19. Rincian Rekening Bendahara Pengeluaran dan Kasir	27
Tabel 20. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak	28
Tabel 21. DIPA Awal	28
Tabel 22. Revisi DIPA ke-1	29

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Jl. Ir. Soekarno Hatta No. 117 Tulungagung – Jawa Timur 66261

Telp. 0355-336516 Fax. 0355-336121 e-mail: pa.tulungagung@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tulungagung Semester I Tahun 2025 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 30 Juni 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tulungagung telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tulungagung, 23 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Tulungagung



Ahmad Iksan
NIP. 19861015 200604 1 004

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tulungagung Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2025. Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp167.034.500,00 atau mencapai 49,87% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp334.929.000,00.

Realisasi Belanja Negara Semester I Tahun 2025 adalah sebesar Rp69.280.000,00 atau mencapai 43,57% dari alokasi anggaran sebesar Rp159.000.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp12.497.500,00, yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp12.497.500,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp12.497.500,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp167.034.500,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp73.672.373,00 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp93.362.127,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos- Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami surplus-LO sebesar Rp93.362.127,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp10.840.373,00 ditambah surplus-LO sebesar Rp93.362.127,00, ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp91.705.000,00) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp12.497.500,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	PER 30 JUNI 2025			PER 30 JUNI 2024		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN	B.1						
Pendapatan	B.1	334.929.000,00	167.034.500,00	49,87	333.953.000,00	141.028.500,00	42,23
Jumlah Pendapatan		334.929.000,00	167.034.500,00	49,87	333.953.000,00	141.028.500,00	42,23
BELANJA	B.2						
Belanja Pegawai	B.3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang	B.4	159.000.000,00	69.280.000,00	43,57	159.250.000,00	92.930.500,00	58,36
Belanja Modal	B.5	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja		159.000.000,00	69.280.000,00	43,57	159.250.000,00	92.930.500,00	58,36

NERACA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

NERACA

PER 30 JUNI 2025 DAN TAHUN 2024

(dalam rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		PER 30 JUNI 2025	PER 30 JUNI 2024
ASET			
Aset Lancar	C. 1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.1	500.000,00	1.000.000,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C. 1.2	449.610.400,00	217.963.500,00
Persediaan	C. 1.3	12.497.500,00	14.216.566,00
Jumlah Aset Lancar		462.607.900,00	233.180.066,00
Aset Tetap	C. 2		
Jumlah Aset Tetap		0,00	0,00
ASET LAINNYA	C. 3		
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH ASET		462.607.900,00	233.180.066,00
Kewajiban Jangka Pendek	C. 4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 4.1	449.610.400,00	217.963.500,00
Uang Muka dari KPPN	C. 4.2	500.000,00	1.000.000,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		450.110.400,00	218.963.500,00
JUMLAH KEWAJIBAN		450.110.400,00	218.963.500,00
EKUITAS			
Ekuitas	C. 5	12.497.500,00	14.216.566,00
JUMLAH EKUITAS		12.497.500,00	14.216.566,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		462.607.900,00	233.180.066,00

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	PER 30 JUNI 2025	PER 30 JUNI 2024
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA	D. 1	167.034.500,00	141.028.500,00
JUMLAH PENDAPATAN		167.034.500,00	141.028.500,00
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	0,00	0,00
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	4.392.373,00	4.435.820,00
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	37.760.000,00	38.640.000,00
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	0,00	0,00
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	31.520.000,00	52.790.500,00
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		73.672.373,00	95.866.320,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		93.362.127,00	45.162.180,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 8		
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00
POS LUAR BIASA	D. 9	0,00	0,00
SURPLUS (DEFISIT) LO		93.362.127,00	45.162.180,00

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	PER JUNI 2025	PER JUNI 2024
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	10.840.373,00	6.752.386,00
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	93.362.127,00	45.162.180,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI		0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0,00	0,00
Penyesuaian Nilai Aset		0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
Koreksi Atas Reklasifikasi		0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset		0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi		0,00	0,00
Lain-lain		0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 3	(91.705.000,00)	(37.698.000,00)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E. 4	1.657.127,00	7.464.180,00
EKUITAS AKHIR	E. 5	12.497.500,00	14.216.566,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Dasar
Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 217/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Instansi;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
19. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
20. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2023 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
21. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
22. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Tulungagung

*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Agama
Tulungagung*

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2025-2029 menguraikan capaian Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2019-2024, visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis, dan juga menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2025-2029.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Tulungagung

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tulungagung. Visi Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG YANG AGUNG”.

Misi Pengadilan Agama Tulungagung:

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk itu Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Tulungagung;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Tulungagung;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Tulungagung.

Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan maka tujuan yang akan dicapai oleh Pengadilan Agama Tulungagung adalah:

1. Meningkatkan proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap Putusan Peradilan.

Sasaran Strategis

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Peradilan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

<i>Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan</i>	Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi Pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satuan Kerja yang ada. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara
---	--

sistem elektronik.

SAKTI menggunakan sistem *single entry point*, *single database*, *multi user* dan/atau multi Satuan Kerja, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, *unaudited*, dan *audited*.

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja dimulai dari proses Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen *Supplier* dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul Akuntansi dan Pelaporan.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.4. Basis Akuntansi

Basis

Akuntansi

Pengadilan Agama Tulungagung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Dasar

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Tulungagung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Tulungagung. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

*Pendapatan-
LRA*

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN);
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

*Pendapatan-
LO*

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca;
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal;
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat	10%

Lancar	Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun;
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya;
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat;
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas	25

Tanaman Tahunan.	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2025 mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp159.000.000,00. Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Tulungagung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Adapun revisi yang dilaksanakan hanya pada halaman III terkait Rencana Penarikan Dana (RPD), sehingga tidak terjadi perubahan/pergeseran anggaran yang dialokasikan.

B.1 Pendapatan

Realisasi Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 adalah sebesar
Pendapatan Rp167.034.500,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp334.929.000,00.
Rp167.034.500,00. Pendapatan Pengadilan Agama Tulungagung bersumber dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.

Adapun rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	PER 30 JUNI 2025		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
4252	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	334.929.000,00	167.034.500,00	49,87
4259	Pendapatan Lain-Lain	0,00	0,00	100,00
Jumlah Pendapatan Bruto		334.929.000,00	167.034.500,00	49,87
Pengembalian		0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		334.929.000,00	167.034.500,00	49,87

Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp26.005.500,00 atau 18,44% dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2024. Hal tersebut disebabkan karena kenaikan Pendapatan ongkos perkara, serta Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.

Perbandingan realisasi PNBP 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBPN Per 30 Juni 2025 dan 2024*(dalam Rupiah)*

KODE	Uraian	PER 30 JUNI 2025	PER 30 JUNI 2024	Kenalkan (Penurunan)	
				Rp	%
4252	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	167.034.000,00	141.028.500,00	26.006.000,00	18,44
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0,00	0,00	0,00	0,00
425233	Pendapatan Ongkos perkara	53.440.000,00	43.095.000,00	10.345.000,00	24,01
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	113.594.500,00	97.933.500,00	15.661.000,00	15,99
4259	Pendapatan Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Bruto		167.034.000,00	141.028.500,00	26.005.500,00	18,44
Pengembalian		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		167.034.000,00	141.028.500,00	26.005.500,00	18,44

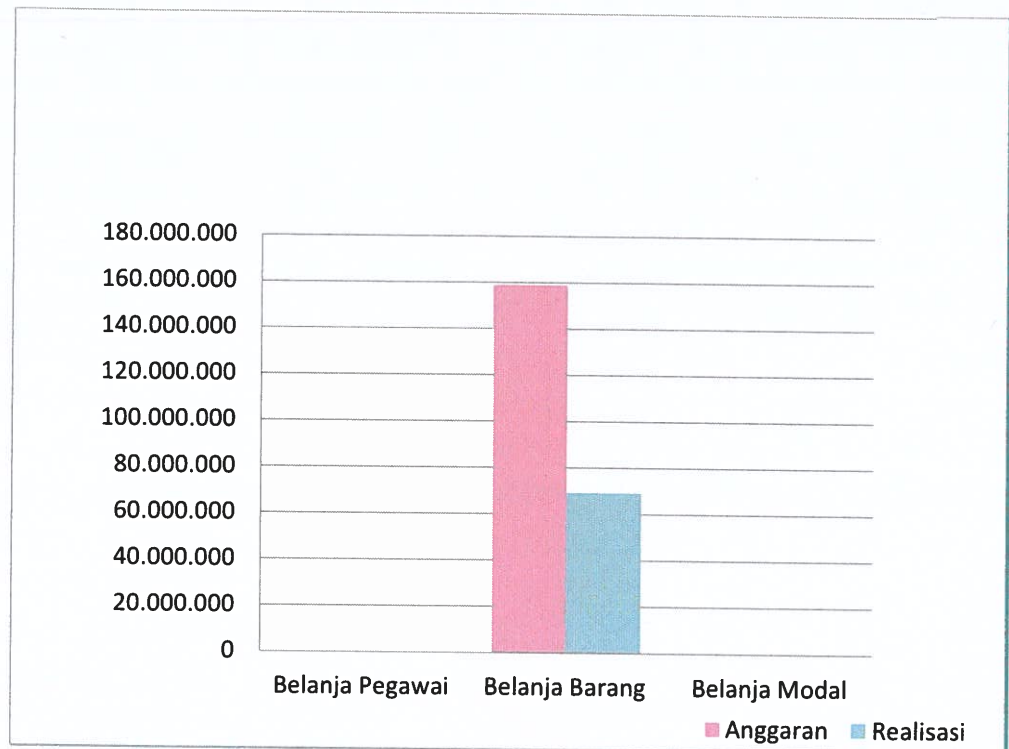
B.2 Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Tulungagung pada periode 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp69.280.000,00 atau 43,57% dari anggaran belanja sebesar Rp159.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 30 Juni 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2025*(dalam Rupiah)*

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
52	Belanja Barang	159.000.000,00	69.280.000,00	43,57
53	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Transaksi Kas Bruto		159.000.000,00	69.280.000,00	43,57
Pengembalian		0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Transaksi Kas Netto		159.000.000,00	69.280.000,00	43,57

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja periode 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp23.650.500,00 atau sebesar 25,45% dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan karena implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada realisasi kegiatan dan anggaran yang belum dapat dilaksanakan secara optimal di semester 1.

Perbandingan realisasi belanja periode 30 Juni 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		PER 30 JUNI 2025	PER 30 JUNI 2024	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0
52	Belanja Barang	69.280.000,00	92.930.500,00	(23.650.500,00)	(25,45)
53	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0
Jumlah Belanja Transaksi Kas		69.280.000,00	92.930.500,00	(23.650.500,00)	(25,45)

B.3 Belanja Pegawai

Belanja

Realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar

Pegawai Rp0,00 dan Rp0,00. Hal ini disebabkan tidak terdapat alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Pengadilan Agama (401382).

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
			-	-
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0
Realisasi Belanja Bruto	0,00	0,00	0,00	0
Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp69.280.000,00 dan Rp92.930.500,00. Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp23.650.500,00 atau sebesar 25,45% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2024.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	Per 30 Juni 2025	Per 30 Juni 2024	(Rp)	%
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Belanja Bahan	240.000,00	240.000,00	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Konsumsi	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
Belanja Jasa Konsultan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0
Belanja Sewa	900.000,00	1.000.000,00	(100.000,00)	0
Belanja Jasa Lainnya	1.600.000,00	2.400.000,00	(800.000,00)	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.520.000,00	52.790.500,00	(21.270.500,00)	(40,29)
Realisasi Belanja Bruto	69.280.000,00	92.930.500,00	(23.650.500,00)	(25,45)
Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Netto	69.280.000,00	92.930.500,00	(23.650.500,00)	(25,45)

Penurunan realisasi Belanja Barang disebabkan karena penurunan realisasi belanja pada belanja barang persediaan konsumsi, belanja sewa, belanja jasa lainnya, dan belanja perjalanan dinas dalam kota.

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Hal ini disebabkan tidak terdapat alokasi anggaran Belanja Modal pada Pengadilan Agama Tulugagung (401382). Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	Per 30 Juni 2025	Per 30 Juni 2024	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00	0
Realisasi Belanja Bruto	0,00	0,00	0,00	0
Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0
Realisasi Belanja Netto	0,00	0,00	0,00	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar Jumlah Aset Lancar Satuan Kerja Pengadilan Agama Tulungagung per 30 Juni 2025 dan
Rp10.840.373,00 2024 masing-masing adalah sebesar Rp10.840.373,00 dan Rp6.752.386,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp500.000,00 dan Rp1.000.000,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara
Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau
Pengeluaran belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.
Rp500.000,00

Tabel 8. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Per 30 Juni 2025	Per 30 Juni 2024
1	Saldo UP	500.000,00	1.000.000,00
2	Kwitansi UP belum di SPJ-kan	0,00	0,00
3	Saldo TUP	0,00	0,00
4	Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	0,00	0,00
Jumlah		500.000,00	1.000.000,00

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan
Setara Kas berasal dari UP/TUP, Kas Lainnya dan Setara Kas. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal
Rp449.610.400,00 pelaporan.

Tabel 9. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	449.610.400,00	217.963.500,00
2	Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor	0,00	0,00
Jumlah		449.610.400,00	217.963.500,00

C.1.3. Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 12.497.500,00 dan Rp14.216.566,00.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Rincian Persediaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	Mutasi	30-Jun-25
1	Barang Konsumsi	10.840.373,00	1.657.127,00	12.497.500,00
	Jumlah	10.840.373,00	1.657.127,00	12.497.500,00

Aset Tetap

Rp0,00

C.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap Pengadilan Agama Tulungagung per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

C.3. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rp0,00 Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar Kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Tulungagung merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga dan Uang Muka dari KPPN.

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp449.610.400,00 dan Rp217.963.500,00

Rp449.610.400,00 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Tabel 11. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	449.610.400,00	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
Jumlah		449.610.400,00	

C.4.2. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp500.000,00 dan Rp1.000.000,00.

Rp500.000,00 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal pelaporan.

C.5 Ekuitas

Ekuitas Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar
Rp12.497.500,0 Rp12.497.500,00 dan Rp14.216.566,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang
0 merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas
 disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp167.034.500,00 dan Rp141.028.500,00
Rp167.034.500,00 Pendapatan tersebut terdiri dari:
00

Tabel 12. Perbandingan Rincian Pendapatan Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB Lainya				
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	167.034.500,00	141.028.500,00	18,44
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		167.034.500,00	141.028.500,00	18,44
Total		167.034.500,00	141.028.500,00	18,44

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengadilan Agama Tulungagung berasal dari Penerimaan Pegara Bukan Pajak Lainnya berupa penerimaan dari entitas lain. Periode 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp26.006.000,00 (18,44%) dibanding Tahun 2024.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp0,00 Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah.

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp4.392.373,00 Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.392.373,00 dan Rp4.435.820,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan pada periode

30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar 0,98% dibanding periode 30 Juni 2024.

Tabel 13. Perbandingan Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	4.392.373,00	4.435.820,00	(0,98)
Total		4.392.373,00	4.435.820,00	(0,98)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp37.760.000,00 dan Rp38.640.000,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 14. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Bahan	240.000,00	240.000,00	0
2	Beban Jasa Konsultan	35.000.000,00	35.000.000,00	0
3	Beban Sewa	900.000,00	1.000.000,00	(10,00)
4	Beban Jasa Lainnya	1.600.000,00	2.400.000,00	(33,33)
5	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20.000,00	0,00	100,00
Total		37.760.000,00	38.640.000,00	(2,28)

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan	0,00	0,00	0
Total		0,00	0,00	0

0

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp0,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Aset	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penyusutan	0,00	0,00	0,00
1	Beban Amortisasi Software	0,00	0,00	0,00
2	Beban Amortisasi Lisensi	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Amortisasi	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00

D.8 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional
Rp0,00

Pos Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Rp0,00

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar
Rp10.840.373,00 Rp10.840.373,00 dan Rp6.752.386,00
0

E.2 Surplus/Defisit LO

Surplus LO Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah
Rp93.362.127,00 sebesar Rp93.362.127,00 dan Rp45.162.180,00. Surplus LO merupakan penjumlahan
0 selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Nilai transaksi antar entitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing
(Rp91.705.000,00) sebesar (Rp91.705.000,00) dan (Rp37.698.000,00). Transaksi antar Entitas adalah
0) transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 17. Rincian Transaksi Antar Entitas

(dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	91.705.000,00
Diterima dari Entitas Lain	0,00
Transfer Keluar	0,00
Transfer Masuk	0,00
Pengesahan Hibah Langsung	0,00
JUMLAH	91.705.000,00

E.4 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan Ekuitas Terdapat kenaikan ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar
Rp1.657.127,00 Rp1.657.127,00 dan Rp7.464.180,00.

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar
Rp12.497.500,00 Rp12.497.500,00 dan Rp14.216.566,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca pada satuan kerja Pengadilan Agama Tulungagung yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 30 Juni 2025.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pada periode sampai dengan 30 Juni 2025 tidak terdapat temuan pada pengelolaan Anggaran dan penyampaian Laporan pada Pengadilan Agama Tulungagung.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tulungagung untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1) Rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Tulungagung

Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2025 menerima uang persediaan (UP), mengelola, dan menyimpan sisa uang UP/TUP pada brankas dan rekening virtual. Selain itu juga terdapat rekening untuk menampung biaya perkara yang dikelola oleh Kasir dengan Nomor rekening 7150771506 (RPL 150 PS PA TA UTK PERKARA) dan memiliki sebesar Rp449.610.400,00 per 30 Juni 2025. Adapun rekening yang dibuka oleh Bendahara Pengeluaran dan Kasir Pengadilan Agama Tulungagung sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Rekening Bendahara Pengeluaran dan Kasir Penerimaan Perkara

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening	Tanggal Pembukaan Rekening
1	BPG 150 Pengadilan Agama Tulungagung QQ 401382	BRI Cabang Tulungagung 6515.44.013821.00.0	29 Juli 2021
2	RPL 150 PS PA TA UTK PERKARA	BSI Cabang Tulungagung 7150771506	06 Januari 2021

2) Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pendapatan Negara pada 30 Juni 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp167.034.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 20. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

NO.	MAP	JENIS PNBP	JUMLAH SETORAN
1	4 2 5 2 3 3	Pendaftaran Perkara	53.440.000
2	4 2 5 2 3 9	Hak Redaksi	17.340.000
3	4 2 5 2 3 9	Panggilan Pertama	33.600.000
4	4 2 5 2 3 9	Pemberitahuan Isi Putusan	11.760.000
5	4 2 5 2 3 9	Akta Cerai	19.440.000
6	4 2 5 2 3 9	Pendaftaran Kuasa	14.130.000
7	4 2 5 2 3 9	Pengambilan Salinan Putusan	14.841.000
8	4 2 5 2 3 2	Legalisasi Tanda Tangan	0
9	4 2 5 2 3 9	Pengembalian Sisa Panjar	2.483.500
10	4 2 5 2 3 9	Eksekusi	0
11	4 2 5 2 3 9	Pemeriksaan Setempat	0
JUMLAH			167.034.500

3) Revisi DIPA

DIPA pada Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor: Nomor SP DIPA-005.04.2.401382/2024 tanggal 24 November 2024 berjumlah sebesar Rp159.250.000,00 (seratus lima puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. DIPA Awal

Tabel 21. DIPA Awal

PROGRAM	AKUN	DIPA AWAL (Rp)
1053.QBA.003	522131	77.000.000,00
1053.QCA.001	521811	1.500.000,00
	524113	8.500.000,00
1053.QCA.002	521211	240.000,00
	522141	2.000.000,00
	522191	3.200.000,00
	524113	66.560.000,00
JUMLAH PAGU		159.000.000,00

- b. Revisi DIPA ke-1 tanggal 17 Februari 2025 (Tidak terdapat perubahan pagu)

Tabel 22. Revisi DIPA ke-1

PROGRAM	AKUN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
1053.QCA.001	521114	0,00	600.000,00
	521811	1.500.000,00	3.300.000,00
	524113	8.750.000,00	8.750.000,00
1053.QCA.002	522141	2.000.000,00	1.200.000,00
	522191	3.200.000,00	1.600.000,00
	524113	66.560.000,00	66.560.000,00
JUMLAH		159.000.000,00	159.000.000,00

- 3). Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya dan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 130/KPA.W13-A11/SK.KU.1.1.1/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung, telah menunjuk:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Ahmad Iksan, S.H., M.H.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Riky Yohana, S.E., M.H.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Ahmad Iksan, S.H., M.H.
Bendahara Pengeluaran	: Dita Amelia, A.Md.Ak.
Bendahara Penerimaan	: Megatru Raka Pamungkas, S.E.

DATA PENDUKUNG

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025
BAGIAN ANGGARAN 005.04

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Agama 04
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG 401382

Tgl Data : 23/07/25 7:03 AM
Tgl Cetak : 23/07/25 2:25 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah								
I. Pendapatan Perpajakan								
1. Pajak Dalam Negeri								
2. Pajak Perdagangan Internasional								
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak								
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	334,929,000	167,034,500	(167,894,500)	49.87	333,953,000	141,028,500	(192,924,500)	42.23
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan								
3. Pendapatan BLU								
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	334,929,000	167,034,500	(167,894,500)	49.87	333,953,000	141,028,500	(192,924,500)	42.23
III. Pendapatan Hibah								
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	334,929,000	167,034,500	(167,894,500)	49.87	333,953,000	141,028,500	(192,924,500)	42.23
B. Belanja Negara								
I. Belanja Pemerintah Pusat								
1. Belanja Pegawai	159,000,000	69,280,000	(89,720,000)	43.57	159,250,000	92,930,500	(66,319,500)	58.36
2. Belanja Barang								
3. Belanja Modal	159,000,000	69,280,000	(89,720,000)	43.57	159,250,000	92,930,500	(66,319,500)	58.36
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang								
5. Belanja Subsidi								
6. Belanja Hibah								
7. Belanja Bantuan Sosial								
8. Belanja Lain-lain								
II. Transfer ke Daerah								
1. Dana Bagi Hasil								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Agama 04
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG 401382

Tgl Data : 23/07/25 7:03 AM
Tgl Cetak : 23/07/25 2:25 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025			2024		
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
1	2	4	5	7	8	9
			%			%
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	159,000,000	69,280,000	(89,720,000)	159,250,000	92,930,500	(66,319,500)
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0
			43.57			58.36

Keterangan :
FINAL

TULUNGAGUNG, 23 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGUNA ANGGARAN
At-Idad Iksan, S.H., M.H.
NIP 198616172006041004

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (401382) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 23/07/25 7:03 AM
Tgl Cetak : 23/07/25 2:25 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	167,034,500	141,028,500	26,006,000	18.44
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	167,034,500	141,028,500	26,006,000	18.44
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	167,034,500	141,028,500	26,006,000	18.44
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	4,392,373	4,435,820	(43,447)	(0.979)
Beban Barang dan Jasa	37,760,000	38,640,000	(880,000)	(2.277)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	31,520,000	52,790,500	(21,270,500)	(40.292)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2025
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (401382) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 23/07/25 7:03 AM

Tgl Cetak : 23/07/25 2:25 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	73,672,373	95,866,320	(22,193,947)	(23.151)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	93,362,127	45,162,180	48,199,947	106.726
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	93,362,127	45,162,180	48,199,947	106.726
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	93,362,127	45,162,180	48,199,947	106.726

Keterangan :

FINAL

TULUNGAGUNG, 23 Juli 2025
Penanggung Jawab HKPA
KUASA PENGUNAHTGGAPAN
AHMAD IKSAN, S.H., M.H.
NIP. 198810152006041004



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (401382) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 23/07/25 7:03 AM

Tgl Cetak : 23/07/25 2:26 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	500,000	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	449,610,400	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	12,497,500	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	449,610,400
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	500,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	69,280,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	167,034,500	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	6,049,500
0.0	391111	Ekuitas	0	10,840,373
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	53,440,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	113,594,500
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	240,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	35,000,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	900,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,600,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	31,520,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	4,392,373	0
JUMLAH			703,314,773	703,314,773

Keterangan :

FINAL

TULUNGAGUNG, 23 Juli 2025

 Penanggung Jawab UAKPA
 KUASA PENGGUNAAN

 AHMAD IKSAN, S.H., M.H.
 NIP 198610152006041004

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (401382) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 23/07/25 7:03 AM

Tgl Cetak : 23/07/25 2:25 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	500,000	0	500,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	449,610,400	0	449,610,400	0.00
Persediaan	12,497,500	10,840,373	1,657,127	15.29
JUMLAH ASET LANCAR	462,607,900	10,840,373	451,767,527	4,167.45
JUMLAH ASET	462,607,900	10,840,373	451,767,527	4,167.45
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	449,610,400	0	449,610,400	0.00
Uang Muka dari KPPN	500,000	0	500,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	450,110,400	0	450,110,400	
JUMLAH KEWAJIBAN	450,110,400	0	450,110,400	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	12,497,500	10,840,373	1,657,127	15.29
JUMLAH EKUITAS	12,497,500	10,840,373	1,657,127	15.29
JUMLAH EKUITAS	12,497,500	10,840,373	1,657,127	15.29
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	462,607,900	10,840,373	451,767,527	4,167.45

Keterangan :

FINAL

TULUNGAGUNG, 23 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AHMAD IRBAN, S.H., M.H.

NIP. 198610152008041004



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (401382) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 23/07/25 12:26 PM

Tgl Cetak : 23/07/25 2:25 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	10,840,373	6,752,386	4,087,987	60.54
SURPLUS/DEFISIT-LO	93,362,127	45,162,180	48,199,947	106.73
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(91,705,000)	(37,698,000)	(54,007,000)	143.26
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1,657,127	7,464,180	(5,807,053)	(77.8)
EKUITAS AKHIR	12,497,500	14,216,566	(1,719,066)	(12.09)

Keterangan :

FINAL

TULUNGAGUNG, 23 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGUNA ANGGARAN
AHMAD IKSAN, S.H., M.H.
NIP. 198610152006041004